BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan peluang baru bagi Pemerintah dengan memanfaatkannya dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga dicapainya efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja pemerintah yang kemudian mengarah pada terwujudnya perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi dikenal sebagai *Electronic Government* atau *e-Government*.

Diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan semangat otonomi daerah, mendorong setiap daerah untuk berupaya meningkatkan citra, kualitas penyelenggaran pemerintahan dan tentunya kualitas pelayanan publiknya. Penerapan *e-Government* dalam penyelenggaraan pemerintah dinilai dapat meningkatkan performa kinerja Aparatur Pemerintah. Pembuatan situs/web Pemerintah Daerah merupakan langkah awal dalam pengembangan konsep *e-Government.*

Dengan demikian pihak-pihak yang berkepentingan/stakeholders (pemerintah, pelakubisnis, masyarakat, swasta) dapat memperoleh informasi, berinteraksi dan melakukan transaksi/pelayanan publik dapat lebih cepat, efektif, dan efesien. Penggunaan *ICT* dalam sektor pemerintahan inilah yang kemudian menghasilkan hubungan-hubungan baru yang dikenal sebagai ruang lingkup *e-*

Government seperti G2C *(government to citizen)*, G2B *(government to business)* G2G *(government to government)*, dan G2E *(government to employees)*.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan *e-government* berdasarkan dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengembangan *Electronik Government*. Kebijakan penerapan *electronic government (e-government)* merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI), diiringi semakin meluasnya penggunaan internet sebagai akses ke dunia maya. Perubahan pemanfaatan teknologi informasi tersebut selain dalam cara berkomunikasi dan menikmati hiburan, juga dalam pemerintahan

Kota Bandung telah mengembangkan *e-Government* sejak tahun 2001 dengan adanya www.bandung.go.id yang merupakan gerbang Kota Bandung bagi masyarakat global melalui internet. Dalam penerapannya tentulah tidak mudah dan murah, namun keseriusan kota Bandung dalam menerapkan *e-Government* hingga saat ini telah menunjukkan sejumlah hasil. Infrastruktur fasilitas pemerintahan serta pelayanan publik berbasis internet telah berkembang dengan baik di Kota Bandung.

Menurut Peraturan Menteri Permentakartrans No. PER.07/MEN/IV/2008 tentang system penempatan tenaga kerja, dalam peraturan tersebut menetapkan tugas dan fungsi lembaga penempatan tenga kerja publik di setiap tingkatan, baik itu pusat, propinsi dan kab/kota. Sehingga dengan aturan ini diperjelas bahwa pelayanan penempatan tenaga kerja dilakukan oleh Disnaker kab/kota (daerah)

yang meliputi informasi pasar kerja, pembinaan dan koordinasi dengan instansi lain. Pasal 24 yang menjelaskan bahwa (1) Pelayanan penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara manual dan/atau sistem daring *(on-line system)* (2) Pelayanan penempatan tenaga kerja melalui sistem daring *(on-line system)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dalam satu sistem pelayanan penempatan tenaga kerja nasional.

Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) merupakan instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintah Daerah dan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan, yang meliputi penempatan tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan, kesejahteraan tenaga kerja dan pengangguran. Sesuai dengan tugasnya itu, instansi ini membutuhkan suatu informasi yang mudah diakses, akurat, cepat dan tepat. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dibutuhkan suatu sistem yang baik, sehingga setiap pihak yang terkait dapat memperoleh informasi yang dibutuhkannya.

Rendahnya penyerapan angkatan kerja antara lain juga dipengaruhi oleh ketidakpastian kualitas pencari kerja itu sendiri dalam mengisi peluang atau kesempatan kerja. Berdasarkan laporan penempatan ketenagakerjaan diketahui bahwa terdapat lowongan-lowongan pada sektor-sektor industri pengolahan, yang tidak sepenuhnya dapat terisi oleh para pencari kerja yang dikarenakan kriteria kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan tidak memenuhi persyaratan. Dalam upaya mempertemukan para pencari kerja dan pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja secara cepat dan tepat sesuai perkembangan teknologi, telah dibangun Bursa

Kerja Online yang merupakan pengembangan model Bursa Kerja Konvensional. Melalui BKOL para pencari kerja dan pengusaha dapat mendaftarkan secara langsung kebutuhan dengan menggunakan akses internet.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyediakan Bursa Kerja Online (BKOL) sebagai sarana untuk dapat memfasilitasi pencari kerja dan calon pengguna tenaga kerja untuk memperoleh informasi kesempatan kerja melalui bursa kerja terpadu/job fair, bursa kerja khusus, bursa kerja *on-line* maupun melalui program atau kegiatan yang orientasinya untuk memberikan informasi kerja kepada masyarakat dan informasi calon tenaga kerja kepada calon pengguna tenaga kerja. Hal ini merupakan satu diantara realisasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018, urusan ketenagakerjaan.

Implementasi Kebijakan Bursa Kerja online (BKOL) adalah suatu system untuk memfasilitasi pelayanan publik dalam memberikan informasi, mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Bursa Kerja online (BKOL) diharapkan dapat memberikan pelayanan dalam meningkatkan produktivitas dan pelaksanaan kebijakan. Bursa Kerja online (BKOL) dalam implementasinya terdiri dari adanya komponen yang berupa aplikasi informasi dengan menggunakan sistem komputer yang memberikan berbagai informasi ketenagakerjaan yang dapat diakses melalui http://disnaker.bandung.go.id.

Melalui sistem ini pelayanan kepada masyarakat pencari kerja dan pemberi kerja dapat berjalan dengan praktis, cepat, dan efisien, karena pelayanan Bursa Kerja Online (BKOL) berjalan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tidak

dibatasi lokasi, waktu pelayanan cepat, akurasi data akurat, cakupan informasi tidak terbatas jarak dan waktu. Dengan dibangunnya Bursa Kerja Online (BKOL) ini juga diharapkan dapat mempercepat proses pertemuan antara pencari kerja dan pemberi kerja yang mempermudah terjadinya penempatan.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam memberikan pelayanan publiknya sudah menerapkan pelayanan melalui Bursa Kerja online (BKOL), Bursa Kerja Online (BKOL) sudah diterapkan tetapi pelaksanaannya belum optimal, *Pertama,* Komunikasi yang di lakukan Disnaker dalam penyampain informasi hanya penjelasan melalui website http://disnaker.bandung.go.id dengan minimnya sosialisasi dari aparatur Dinas Tenaga Kerja terkait Bursa Kerja Oline (BKOL) tersebut mengakibatkan masyrakat pencari kerja banyak yang tidak mengetahui adanya Bursa Kerja Online (BKOL), *Kedua*, Sumber Daya merupakan permasalahan yang terjadi pada implementasi kebijakan *e-Government* tentang Bursa Kerja Online, Hal ini dilihat dari kurang *up to date* nya informasi di *website* Bursa Kerja Online (BKOL) dikarenakan ada beberapa staff yang belum memahami Bursa Kerja Online selain itu penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan bidangnya. *Ketiga,* Struktur Birokrasi merupakan yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan, permasalahan yang terjadi pada strukutur birokrasi BKOL dimana terdapat pembagian tanggung jawab yang belum merata khususnya mengenai pelaksanaan BKOL.

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk meneliti implementasi *E-government*. Peneliti memperhatikan dan menganalisis beberapa penelitian

yang terkait dengan topik electronic goverrntment. Peneliti memilih tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *E-government* yaitu penelitian dari Lia Amalia Solihat, Muhammad Husni, dan Wahyu Mahendra.

Penelitian yang pertama yaitu penelitian Lia Amalia Solihat: ”Peranan *E-government* dalam mendukung Transparansi BUMN: Studi Kasus BUMN Online pada Kementrian Negara BUMN RI”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan *E-government* melalui BUMN Online dimana pada penelitian ini juga digambarkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan BUMN Online di Kementrian Negara BUMN RI. Lia Amalia Solihat menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data studi lapangan dan studi pustaka. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil yaitu implementasi BUMN Online mampu memenuhi kebutuhan yang dirasakan, baik oleh Kementrian Negara BUMN maupun oleh publik yang berkaitan dengan transparansi informasi. Hasil lain yang diperoleh yaitu terdapat kendala dalam pengembangan BUMN Online dalam hal kurangnya dukungan dari pejabat teknis Kementrian BUMN dan manajemen BUMN atas keberadaan BUMN online tersebut. Kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah dalam hal pendekatan yang digunakan di mana pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, padahal akan lebih tampak apabila dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan berlandaskan pada teori transparansi. Dalam hal pengumpulan data, peneliti hanya mewawancarai dua responden dari kalangan mayarakat padahal masyarakat merupakan faktor penting dalam penilaian sebuah transparansi. Meskipun demikian, pembahasan dalam penelitian ini sudah cukup baik dari segi analisis.

Penelitian yang kedua yaitu “Analisis Penerapan *Electronic Government* di Provinsi DKI Jakarta” oleh Muhammad Husni. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan penerapan *E-government* di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan aspek kompleksitas dan manfaat *E-government*, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan penerapan *E-government* di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan penelitan lapangan dengan wawancara mendalam. Kesimpulan penelitian ini adalah berdasarkan aspek kompleksitas dan manfaat *E-government*, dimana Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan e-government dengan cukup baik; penerapan *e-government* di Provinsi DKI Jakarta telah sampai pada level dimana stakeholder dapat berinteraksi melalui media internet; dan DKI Jakarta memiliki kelebihan dalam hal pendanaan infrastruktur *e-government*. Penelitian ini memiliki kelemahan dalam hal metode, yaitu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif tetapi peneliti menganalisis berdasarkan teori yang digunakan sehingga bertolak belakang dengan esensi pendekatan kualitatif itu sendiri. Meski demikian, pembahasan yang diberikan sudah cukup baik.

Penelitian ketiga yaitu ”Implementasi *Electronic Government* Pemerintahan Kota Depok” oleh Wahyu Mahendra. Penelitian ini bertujuan untuk Memberikangambaran mengenai implementasi *E-government* Pemerintah Kota Depok serta hambatan-hambatan dalam hal implementasi *E-government*. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan penelitan lapangan dengan

wawancara mendalam serta observasi. Kesimpulan penelitian ini adalah Implementasi *E-government* di Kota Depok dilihat dari 10 indikator dimana hanya 7 indikator yang berpredikat baik, 2 indikator belum baik, dan 1 indikator tidak dapat diukur. Hambatan yang dialami dalam implementasi *E-government* terdiri dari: sosialisasi bagi pegawai yang kurang, masih dipeliharanya budaya tradisional, posisi Diskominfo yang kurang strategis, produk kebijakan yang belum jelas, menjadikan instansi yang nomaden sebagai excuse, beban biaya VPN yang mahal, dan anggaran belum diprioritaskan dengan baik. Kelemahan penelitian ini adalah, peneliti tidak mewawancara pihak public yaitu masyarakat Depok sendiri sebagai tujuan dari *E-government* di kota Depok, terutama dikarenakan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Namun secara umum pembahasan penelitian ini telah baik dan detail.

Ketiga penelitian di atas, memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai *E-government*. Kesamaan aspek antara ketiga penelitian tersebut dengan yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama berfokus pada aspek implementasi. Penelitian yang ketiga juga sama-sama membahas mengenai aspek analisis *E-government* suatu wilayah. Pada penelitian ini, peneliti juga akan melihat kendala dan hambatan yang terdapat melalui Bursa Kerja Online, peneliti tidak memfokuskan pada implementasi dari teori hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat (G2G, G2B, dan G2C).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut: **"Implementasi Kebijakan *e-Government* Tentang Bursa Kerja Online Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan *e-Government* Tentang Bursa Kerja Online Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung berdasarkan faktor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana Implementasi Kebijakan Bursa Kerja Online pada dinas tenaga kerja kota bandung, Sedangkan tujuanya adalah:

1. Untuk mengetahui *Comunication* (Komunikasi) dalam Implementasi Kebijakan Bursa Kerja Online pada dinas tenaga kerja kota bandung.
2. Untuk mengetahui *Resouces* (Sumber daya) dalam Implementasi Kebijakan Bursa Kerja Online pada dinas tenaga kerja kota bandung.
3. Untuk mengetahui *Disposition* (Tingkat kepatuhan pelaksana) dalam Implementasi Kebijakan Bursa Kerja Online pada dinas tenaga kerja kota bandung.

4. Untuk mengetahui *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi) dalam Implementasi Kebijakan Bursa Kerja Online pada dinas tenaga kerja kota bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya bagi:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan teori Implementasi Kebijakan khususnya dan perkembangan teori Imu Pemerintahan pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

a) Guna Bagi Peneliti

Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi peneliti sendiri untuk terus melakukan penelitian-penelitian yang lain mengenai permasalahan permasalahan lain yang ada di sekitar peneliti.

b) Guna Bagi Lembaga

Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi instansi terkait yang menjadi objek penelitian sehingga diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan Implementasi Kebijakan Bursa Kerja Online pada Dinas Tenaga Kerja Kota

Bandung dan bisa menjadi sumber jurnal untuk dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

c) Guna Bagi Masyarakat

Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang akan mencari informasi ketenaga kerjaan Pada Bursa Kerja Online pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

d) Guna Bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan Unikom

Semoga penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi Prodi Ilmu Pemerintahan Unikom agar dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Unikom di waktu yang akan datang.